

Tantangan Dualisme Ekonomi di Indonesia : Tradisional Vs Modern Dalam Satu Sistem

Septi Mahmudah¹, Vina Anggraini², Novia Aisyah Putri³, Ola Setya⁴,Cut Misni Mulasawi⁵

Universitas Jenderal Soedirman,Jl. Profesor DR. HR Boenjamin No.708. Purwokerto, Indonesia

* Corresponding Author. Email: Septi.Mahmudah@mhs.unsoed.ac.id

Abstrak: Dualisme ekonomi di Indonesia merupakan fenomena struktural yang kompleks, di mana sektor tradisional dan modern berjalan berdampingan namun tidak seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan utama dalam koordinasi kebijakan, pelatihan tenaga kerja, dan integrasi antara kedua sektor tersebut. Melalui pendekatan studi literatur, ditemukan bahwa kesenjangan teknologi, keterbatasan akses terhadap modal, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi hambatan utama dalam proses transformasi ekonomi. Selain itu, urbanisasi tanpa industrialisasi telah memperbesar sektor informal, sedangkan kebijakan pembangunan seperti ekonomi hijau dan biru belum menjangkau sektor tradisional secara efektif. Studi ini menekankan pentingnya strategi pembangunan yang inklusif dan kolaboratif untuk menjembatani kesenjangan antara sektor tradisional dan modern demi mencapai pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Dualisme Ekonomi, Ekonomi Tradisional, Ekonomi Modern, Urbanisasi, Teknologi.

The Challenge of Economic Dualism in Indonesia : Traditional Vs Modern in One System

Abstract: *Economic dualism in Indonesia is a complex structural phenomenon, where traditional and modern sectors run side by side but not in balance. This study aims to examine the main challenges in policy coordination, workforce training, and integration between the two sectors. Through a literature study approach, it was found that the technology gap, limited access to capital, and weak coordination between the central and regional governments are the main obstacles in the process of economic transformation. In addition, urbanization without industrialization has enlarged the informal sector, while development policies such as the green and blue economy have not reached the traditional sector effectively. This study emphasizes the importance of an inclusive and collaborative development strategy to bridge the gap between the traditional and modern sectors in order to achieve equitable and sustainable economic development.*

Keywords: *Economic Dualism, Traditional Economy, Modern Economy, Urbanization, Technology.*

How to Cite: Mulasawi, C. M., & Julialevi, K. O. (2020). Optimalisasi Financial Teknologi (Fintech) terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan usaha menengah purwokerto. *Jurnal JEBA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Ekonomi*, 27(1), 1-6. doi:<http://dx.doi.org/10.30870/unik.v6i2.13927> (Ikuti cara penulisan seperti yang dicontohkan. Untuk nomor edisi, volume, halaman dan DOI tidak perlu diedit).

PENDAHULUAN

Dualisme ekonomi merupakan salah satu ciri khas struktur ekonomi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Perekonomian Indonesia tumbuh dalam realitas yang cukup unik dimana satu sisi kita melihat kemajuan teknologi, industri modern dan berkembangnya sektor jasa yang cukup pesat di kota-kota besar. Namun di sisi lain, kehidupan ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan masih sangat bergantung pada sektor-sektor tradisional seperti pertanian, perdagangan kecil dan usaha rumah tangga. Kedua sisi ini yaitu modern dan tradisional berjalan berdampingan namun tidak selalu sejajar, inilah yang sering kita sebut sebagai dualisme ekonomi atau adanya dua struktur ekonomi yang sangat berbeda dalam satu sistem nasional. Arti dari situasi saat ini bukanlah semata-mata tentang adanya ketimpangan produktivitas. Menurut hasil penelitian (Gultom, n.d.) menunjukkan bahwa adanya faktor utama yang mendorong munculnya sektor informal adalah biaya transaksi yang tinggi dan struktur regulasi yang cukup rumit. Dimana banyak pelaku ekonomi memilih tetap berada di luar sistem formal karena merasa lebih mudah untuk bergerak tanpa perlu terlibat dalam perizinan maupun pajak, meski itu akan mengakibatkan mereka kehilangan akses terhadap proteksi hukum, jaminan sosial pembiayaan. Sektor informal sering kali menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang tidak mampu untuk masuk dalam dunia kerja formal. Dalam banyak contoh kasus, sektor ini justru berperan sebagai penyelamat ekonomi masyarakat saat kondisi krisis, meskipun pekerja di dalamnya sering kali tidak memiliki jaminan sosial atau perlindungan tenaga kerja.

Secara khusus melalui penelitian yang dilakukan oleh (*Piyoto*, n.d.) menjelaskan bagaimana sektor informal telah menjadi penyelamat ekonomi selama masa krisis, namun pada saat yang sama menghambat proses transformasi struktural nasional. Jika dilihat melalui pandangan tenaga kerja selama periode 1996-2014 menemukan bahwa angkatan kerja banyak berpindah ke sektor informal ketika krisis dan stagnan di sana dalam jangka panjang, dimana menunjukkan bahwa tidak efektifnya transfer kerja dari tradisional ke formal. Melalui riset lanjut pada tahun 2018-2022 menunjukkan hambatan lain yaitu jenjang pendidikan dan angka pengangguran yang tinggi justru berhubungan positif dengan peningkatan tenaga kerja informal, menunjukkan bahwa sektor ini belum mampu menjadi fase transisi ke formal yang sebenarnya. Ketidakseimbangan antara dua sektor ini tidak hanya menciptakan kesenjangan pendapatan dan produktivitas, tetapi juga memperlambat proses transformasi struktural yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Melalui pendekatan studi literatur, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tantangan yang ditimbulkan oleh dualisme ekonomi di Indonesia, menelaah penyebab keberlanjutannya, serta mengevaluasi dampaknya terhadap pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

METODE

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif studi literatur. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami fenomena dualisme ekonomi antara sektor tradisional dan modern di Indonesia dengan menggali dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan. Penelitian ini dimulai dengan identifikasi dan seleksi literatur. Sumber literatur yang dipilih termasuk buku akademik, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen resmi dari lembaga pemerintah dan organisasi internasional yang dihormati. Sumber dipilih secara terencana dengan mempertimbangkan tingkat relevansinya terhadap masalah dualisme ekonomi dari perspektif masa lalu dan masa kini. Selain itu, validitas keilmianahan sumber digunakan sebagai acuan penting untuk memastikan kualitas data yang dievaluasi. Dalam proses ini, peneliti menggabungkan berbagai perspektif dan hasil penelitian yang telah dipublikasikan. Kemudian, mereka membagi informasi berdasarkan topik utama seperti ketimpangan distribusi sumber daya, perbedaan produktivitas antara sektor modern dan tradisional, dan bagaimana ketimpangan ini berdampak pada kebijakan ekonomi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan berbagai perspektif akademik dan kebijakan dalam memahami akar masalah dualisme ekonomi. Hasil analisis ini kemudian dikompilasi menjadi gambaran menyeluruh tentang kondisi saat ini di Indonesia, yang mencakup dinamika hubungan antara sektor tradisional dan modern. Selain itu, metodologi studi literatur ini mengarahkan penelitian untuk mengevaluasi dampak sistem dualisme ekonomi terhadap pembangunan nasional yang berkembang.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Dualisme Ekonomi di Indonesia

Untuk mewujudkan kemakmuran bangsa, strategi perkembangan ekonomi adalah kuncinya. Untuk mencapai hal ini, pemerintah dan warga negara harus berhubungan dengan satu sama lain secara sistematik (Ayunda et al., 2022). Ketimpangan struktur perekonomian sering terjadi selama proses pembangunan ekonomi, terutama di negara berkembang. Ada ketidakseimbangan dalam pertumbuhan ekonomi karena dua bidang yang sangat berbeda berkembang secara tidak seimbang. Dalam suatu negara, terutama negara berkembang, dua sektor ekonomi yang sangat berbeda hidup berdampingan. Ini disebut dualisme ekonomi. Perekonomian ganda adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan dualisme ekonomi; dalam hal ini, ada sektor ekonomi yang lebih besar dan lebih tradisional yang memiliki kemampuan modern. Pada dasarnya, konsep dualisme mengajak kita untuk tidak meremehkan peran sektor industri kecil. Hal ini disebabkan oleh peran penting yang dimainkan oleh sektor ini karena karakteristiknya yang unik (*Dualisme Dalam Sektor Manufaktur Indonesia: Sebuah Uji Hipotesis Dengan Analisis Input-Output*, n.d.). Di Indonesia, dualisme ekonomi menunjukkan bahwa sistem ekonomi tradisional dan modern berjalan bersama, tetapi dengan perbedaan yang mencolok. Di satu sisi, sektor konvensional masih mendominasi kehidupan sehari-hari masyarakat, yang terdiri dari usaha kecil dan mikro. Keterbatasan teknologi di Indonesia membuat perbedaan jelas antara kota dan pedesaan, yang memperkuat fenomena dualisme ekonomi. Saat ini, penetrasi internet di kota mencapai sekitar 64,10 persen, sementara di desa hanya 35,90 persen, yang menciptakan jurang besar dalam akses ke teknologi digital. Hal ini berdampak langsung pada partisipasi *e-commerce* yang rendah di pedesaan, hanya 24,25 persen, dibandingkan dengan tingkat adopsi yang jauh lebih tinggi di perkotaan, yaitu 75,75 persen. Ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi semakin merata di kota-kota, masih ada banyak daerah yang tidak memanfaatkan teknologi. Akibatnya, sementara daerah perkotaan Indonesia berkembang dengan cepat, potensi ekonomi digital di desa masih belum sepenuhnya dieksplorasi. Ini membuat perbedaan ekonomi secara struktural semakin besar. Sebaliknya, industri ritel kontemporer yang dipimpin oleh perusahaan besar terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dan secara bertahap mulai mengambil pangsa pasar. Perbedaan produktivitas menunjukkan fenomena dualisme ini: usaha besar biasanya lebih produktif dan berkembang lebih cepat daripada usaha kecil konvensional. Ketidakseimbangan ekonomi yang berkelanjutan disebabkan oleh ketimpangan ini, yang merupakan salah satu faktor utama yang memperluas perbedaan antara usaha besar dan kecil (Prasetyanto & Kustiwan, 2023).

Dengan demikian, dualisme antara sektor modern dan tradisional, yang berjalan berdampingan namun bertentangan, menyebabkan tantangan ekonomi di Indonesia. Sementara sektor modern berkembang pesat berkat teknologi dan pasar global, sektor tradisional masih didominasi oleh teknologi sederhana dan produktivitas rendah. Selama sejarahnya, ekonomi Indonesia beroperasi sepenuhnya dengan sistem ekonomi konvensional. Sistem ekonomi yang disebut "ekonomi tradisional" didasarkan pada nilai-nilai budaya masyarakat, dan bergantung pada sumber daya alam dan penggunaan uang yang rendah. Mereka memiliki pembagian kerja yang terbatas, penggunaan sistem barter, dan produksi hanya sesuai kebutuhan (*Ekonomi Tradisional dan Perubahan Sosial*, n.d.). Indonesia telah terjebak dalam arus globalisasi seiring berjalannya waktu. Industrialisasi dan modernisasi dimulai sejak masa kolonial dan diperkuat setelah kemerdekaan membawa Indonesia ke dalam fase transisi menuju ekonomi modern. Ini pasti menimbulkan banyak perubahan dan transformasi bagi negara Indonesia. Sebagian industri mulai menggunakan metode yang lebih maju dan terintegrasi secara global sebagai akibat dari globalisasi dan kemajuan zaman. Dengan fokus yang lebih luas, ekonomi modern adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada penggunaan teknologi canggih, efisiensi produksi, pasar global, dan inovasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Selain produksi dan pertumbuhan, ekonomi modern juga memperhatikan dampak teknologi terhadap pasar dan pekerjaan. Indonesia harus beralih dari ekonomi berbasis sumber daya alam ke ekonomi yang lebih canggih dan berdaya saing tinggi untuk menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi. Perubahan ini penting karena masih ada perbedaan antara sektor tradisional dan modern, yang berdampak pada perbedaan pertumbuhan di antara daerah dan kelompok masyarakat. Melalui berbagai kebijakan, pemerintah berusaha mendorong modernisasi industri dan meningkatkan nilai tambah produk domestik. Misalnya, tujuan dari program Making Indonesia 4.0, yang diluncurkan pada tahun 2018, adalah untuk menjadikan Indonesia salah satu dari sepuluh ekonomi terbesar dunia pada tahun 2030 dengan fokus pada pengembangan sektor teknologi tinggi (Adhikara & Judijanto, 2024).

Keterbatasan Teknologi, dan Urbanisasi Tanpa Industri sebagai Pemicu Dualisme

Sektor tradisional, seperti pertanian, memiliki banyak hambatan untuk adopsi teknologi. Kesenjangan adopsi teknologi antarwilayah adalah salah satunya. Penelitian yang dilakukan oleh (Junaedi et al., n.d.) yang menggunakan analisis meta-frontier menemukan bahwa ada kesenjangan teknologi dan tingkat efisiensi teknis yang signifikan antar provinsi Pulau Jawa. Kondisi lokal yang berbeda ini menunjukkan bahwa teknologi pertanian yang sama mungkin sangat efektif di satu daerah tetapi tidak optimal di tempat lain karena keterampilan petani, lokasi geografis, dan akses ke pelatihan. Selain itu, hambatan utama adalah penyebaran infrastruktur digital dan telekomunikasi yang tidak merata. Menurut penelitian yang dilakukan di Jawa Barat (Gunadi et al., 2019) adopsi teknologi menimbulkan perbedaan sosial dan budaya. Mereka mengatakan bahwa petani konvensional tidak menggunakan teknologi seperti sensor kelembaban atau drone pertanian, meskipun mereka dapat menggunakannya. Ini karena mereka khawatir tentang penggantian tenaga kerja lokal dan kurangnya pelatihan intensif dan dukungan dari pekerja jasa lokal. Ini menunjukkan bahwa teknologi yang baik hanya dapat berfungsi dengan pelatihan dan strategi yang berbasis budaya lokal. Kesenjangan teknologi ini menyebabkan struktur ekonomi dualisme, di mana pertanian tradisional dengan produktivitas rendah dan margin yang sempit terus beroperasi. Sebaliknya, sektor resmi dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan output dan efisiensi. Keterbatasan teknologi di Indonesia membuat perbedaan jelas antara kota dan pedesaan, yang memperkuat fenomena dualisme ekonomi. Saat ini, penetrasi internet di kota mencapai sekitar 64,10%, sementara di desa hanya 35,90%, yang menciptakan jurang besar dalam akses ke internet. Hal ini berdampak langsung pada partisipasi e-commerce yang rendah di pedesaan, hanya 24,25%, dibandingkan dengan tingkat adopsi yang jauh lebih tinggi di perkotaan, yaitu 75,75%.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa arus digital masih belum mencapai banyak wilayah pedesaan meskipun teknologi semakin tersebar di kota-kota. Akibatnya, sementara daerah perkotaan Indonesia berkembang dengan cepat, potensi ekonomi digital di desa masih belum sepenuhnya dieksplorasi. Ini membuat perbedaan ekonomi secara struktural semakin besar. Indonesia juga menghadapi masalah urbanisasi dan penyebaran penduduk yang sama seperti negara-negara sedang berkembang (NSB) lainnya di Asia, terutama populasi perkotaan yang terlalu besar di kota-kota tertentu, terutama di wilayah metropolitan. Pada tahun 1980, hanya sekitar 22,3% orang Indonesia tinggal di kota. Laju pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia adalah 4,60% per tahun pada tahun 1970-1980, naik menjadi 5,36% per tahun pada tahun 1980-1990, tetapi turun pada tahun 1990-1994, menurut data Sensus Penduduk 1990, yang mencapai 30,9%. Dengan kata lain, pertumbuhan populasi disebabkan oleh urbanisasi berkembang hampir dua kali lipat lebih cepat daripada pertumbuhan populasi nasional secara keseluruhan. Fenomena ini menunjukkan bahwa pertumbuhan alami dan dorongan ekonomi dan sosial yang kuat menarik masyarakat ke kota menyebabkan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Sebagian besar orang berpendapat bahwa proses urbanisasi yang buruk di negara-negara berkembang disebabkan oleh pembangunan ekonomi yang tidak terencana dan tidak merata. Pembangunan yang terlalu menekankan pertumbuhan industri modern, terutama industri padat modal, menyebabkan konsentrasi ekonomi di wilayah perkotaan. Akibatnya, kota dan desa memiliki perbedaan sosial dan ekonomi yang jelas.

Disebabkan oleh konsentrasi industri di kota-kota besar, ada ketimpangan pembangunan di antara daerah. Pedesaan sering tertinggal dan terpinggirkan dari infrastruktur, layanan publik, dan peluang ekonomi. Seandainya industrialisasi dapat berjalan beriringan dan terintegrasi dengan urbanisasi, perpindahan penduduk ke kota dapat didukung dengan penciptaan lapangan kerja formal dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Dalam keadaan ideal, urbanisasi akan berfungsi sebagai katalisator untuk kemajuan ekonomi nasional. Namun, urbanisasi sebenarnya tidak diiringi dengan industrialisasi yang cukup. Hal ini menyebabkan peningkatan sektor informal dan permukiman kumuh di perkotaan. Ini memperkuat argumen bahwa model pembangunan ekonomi negara berkembang mengutamakan kepentingan kota dan mengabaikan peran dan kebutuhan pedesaan dalam pembangunan ekonomi.

Tantangan Struktural dalam Koordinasi, Pelatihan, dan Integrasi Ekonomi Tradisional dan Modern

Di tengah upaya untuk meningkatkan inklusi dan kesetaraan ekonomi, tantangan dualisme ekonomi Indonesia mencakup variasi dalam struktur dan produktivitas. juga terkait dengan tantangan struktural yang



signifikan dalam hubungan antara sektor modern dan tradisional dalam sistem ekonomi nasional. Salah satu masalah utama dalam mengelola transisi ekonomi masyarakat dari sektor informal ke sektor formal adalah kurangnya koordinasi antara lembaga pusat dan lokal. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, pelaku ekonomi konvensional lebih suka tetap di sektor informal karena banyaknya regulasi yang tidak konsisten dan kurangnya sinkronisasi kebijakan. Ini karena mereka merasa lebih fleksibel, meskipun mereka harus mengorbankan akses ke jaminan sosial dan perlindungan hukum (Gultom, n.d.).

Selain itu, kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang kurang untuk mendukung transformasi ekonomi modern merupakan masalah besar lainnya. (*Piyoto*, n.d.), menyatakan peralihan tenaga kerja dari sektor informal ke sektor formal tidak akan berhasil karena kurangnya jenjang pendidikan dan kurangnya pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan karena krisis cenderung terjebak dalam sektor informal untuk waktu yang lama tanpa program pelatihan ulang atau program pemulihan keterampilan yang. Ini menunjukkan bahwa sistem pelatihan tenaga kerja gagal berfungsi sebagai penghubung antar sektor. Di sektor tradisional, keterbatasan modal dan teknologi membuat masalah integrasi menjadi lebih sulit. Jurnal tersebut menyatakan bahwa usaha kecil dan rumah tangga di pedesaan masih sangat bergantung pada alat produksi konvensional dan skema pembiayaan informal, yang pada gilirannya memperkuat kemiskinan struktural (Mohammad Maulana Iqbal, 2023). Sebagaimana dinyatakan oleh dualisme teknologi (*DUALISME TEKNOLOGI*, n.d.) sektor tradisional tertinggal di belakang sektor modern karena keterbatasan sumber daya. Dengan ketimpangan ini, perbedaan produktivitas antara industri besar dan usaha kecil, serta antara kota dan pedesaan semakin meningkat.

Lebih lanjut, urbanisasi tanpa industrialisasi menjadi penyebab baru dari melemahnya integrasi ekonomi. Migrasi penduduk dari desa ke kota yang tidak diiringi oleh perluasan lapangan kerja di sektor formal menyebabkan banyak penduduk kota baru akhirnya bekerja di sektor informal dengan tingkat kerentanan tinggi. Ketidakseimbangan ini, seperti dijelaskan oleh (Tahir et al., n.d.), memperlebar ketimpangan antara pusat dan pinggiran serta menghambat pemerataan kesejahteraan. Sektor tradisional yang mestinya menjadi bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan juga belum memperoleh perhatian yang memadai. Penelitian (Marlioka et al., n.d.), menunjukkan bahwa strategi pembangunan hijau dan biru di Indonesia cenderung elitis, lebih melayani sektor formal dan mengabaikan peran nelayan kecil, petani, serta pelaku UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan integratif mungkin merusak perbedaan pembangunan antar kelompok masyarakat dan tidak melihat kenyataan lapangan secara keseluruhan. Secara keseluruhan, banyak bisnis konvensional memilih untuk tetap berada di sektor informal karena lebih fleksibel, meskipun hal ini berarti mereka tidak akan memiliki jaminan sosial dan perlindungan hukum. Hal ini disebabkan oleh regulasi yang sering tumpang tindih dan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Proses perpindahan tenaga kerja dari sektor informal ke sektor formal berjalan lambat dan tidak efektif karena kualitas sumber daya manusia masih rendah dan pendidikan dan pelatihan keterampilan belum memadai. Selain itu, pemilik usaha kecil tradisional menghadapi kesulitan dalam mendapatkan modal dan teknologi, membuat mereka tertinggal dari sektor modern yang menggunakan teknologi canggih. Kondisi ini meningkatkan kemiskinan struktural dan memperlebar jurang produktivitas antara kota dan desa. Sebaliknya, karena urbanisasi tidak didukung oleh industrialisasi, para migran desa yang pindah ke kota harus menerima pekerjaan informal, yang membuat mereka lebih rentan dan menambah perbedaan antara pusat dan pinggiran. Selain itu, kebijakan ekonomi hijau dan biru cenderung bersifat elitis dan berpihak pada sektor formal, mengabaikan petani, nelayan kecil, dan UMKM. Ini menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan saat ini masih belum inklusif dan berpotensi memperluas kesenjangan sosial-ekonomi.

Oleh karena itu, agar integrasi ekonomi tradisional dan modern dapat diwujudkan secara adil dan berkelanjutan, dibutuhkan pembaruan kebijakan yang menyeluruh. Pemerintah perlu memperkuat sistem pelatihan berbasis kebutuhan riil, memperluas akses pembiayaan formal di sektor tradisional, serta menciptakan sistem regulasi yang lebih sederhana dan mendukung transisi menuju ekonomi formal. Pendekatan pembangunan ekonomi harus bersifat lintas sektor dan lintas wilayah, dengan menempatkan sektor tradisional sebagai mitra penting dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional yang merata dan berkelanjutan.

Evaluasi Dampak Sistem Dualisme Ekonomi Terhadap Pembangunan Nasional yang Berkeadilan dan BerkelaJutan

Di Indonesia, ada dualisme ekonomi, dengan sektor modern, seperti manufaktur dan jasa, berkembang dengan cepat, sementara sektor tradisional, seperti kegiatan informal dan pertanian, stagnan. Ini berdampak negatif pada keadilan pembangunan nasional. Studi (Ilmu Manajemen et al., n.d.), menemukan bahwa ketimpangan antar daerah semakin meningkat sebagai akibat dari perubahan struktural ekonomi multiregional di Indonesia. Wilayah dengan infrastruktur yang memadai seperti Jawa dan Bali menikmati pertumbuhan modern sepenuhnya, sementara daerah tertinggal masih bergantung pada pertanian dan sumber daya primer yang menunjukkan dukungan struktural. Dalam penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh (Khoirun Rizky et al., 2025), mengenai integrasi ekonomi hijau dan biru menunjukkan bahwa regulasi inklusif dan strategi sinergis, pembangunan berkelanjutan cenderung hanya melayani sektor formal. Sementara itu disisi lain sektor tradisional terutama nelayan dan petani dengan skala lebih kecil masih terpinggirkan. Sehingga praktik pembangunan ramah lingkungan sering kali gagal menjangkau elemen masyarakat yang paling rawan.

Di sisi kebijakan, sistem dualisme juga mengganggu kesetaraan kualitas hidup. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyanto & Kustiwan, 2023), kebijakan fiskal yang tidak mengikuti penguatan lingkungan hidup di daerah menyebabkan beberapa daerah yang memiliki banyak sumber daya tergeser dari fokus pembangunan, sementara daerah pedesaan yang tidak memiliki sumber daya terus terlupakan. Hal ini menunjukkan bahwa peran sektor tradisional tidak seimbang dalam proses pembangunan berkelanjutan. Namun, penelitian (Arfah et al., n.d.), menekankan bahwa karena peraturan yang belum menyeluruh, ekonomi hijau masih jauh dari kebijakan nasional. Karena itu, petani, pelaku usaha mikro, dan sektor informal belum memiliki akses yang memadai ke program berkelanjutan yang seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup secara adil.

Secara keseluruhan, dinamika tersebut menunjukkan bahwa sistem dualisme ekonomi bukan hanya menciptakan ketimpangan pendapatan, tetapi juga merusak prinsip keadilan distribusi manfaat pembangunan nasional. Pertumbuhan modern menjadi istimewa, menyisakan ruang kosong bagi masyarakat di sektor ekonomi tradisional. Tanpa campur tangan kebijakan yang sengaja dirancang untuk inklusi sektor ini seperti regulasi bantuan teknologi ramah lingkungan, dan pendanaan berbasis komunitas. Konsep pembangunan yang adil dan berkelanjutan akan tetap menjadi jargon tanpa aksi nyata. Oleh karena itu, agenda kebijakan yang ideal adalah menyusun strategi pembangunan berbasis ekonomi inklusif dan hijau, dimana sektor tradisional seperti pertanian dan perikanan tidak hanya menjadi sumber mata pencarian namun juga mendapatkan dukungan untuk naik kelas melalui kolaborasi dengan sektor modern. Ini bisa dicapai melalui pendanaan hijau, sumber daya manusia terlatih dan penguatan institusi lokal, dengan demikian diharapkan transformasi ekonomi akan ikut mengangkat komunitas tradisional sekaligus menjaga keberlanjutan ekologi dan sosial.

SIMPULAN

Di Indonesia, dualisme ekonomi adalah fenomena struktural yang kompleks yang ditandai oleh dua sektor ekonomi yang berjalan berdampingan namun tidak seimbang. Sektor modern, yang berkembang pesat berkat kemajuan teknologi, modal, dan kebijakan, berbeda dengan sektor tradisional, yang masih bergantung pada produksi konvensional dan sumber daya yang terbatas. Tidak hanya produktivitas yang menyebabkan ketidaksesuaian ini, tetapi juga terkait erat dengan hambatan sistemik seperti akses teknologi, kesenjangan pendidikan, kurangnya koordinasi kebijakan pusat-daerah, dan kurangnya dukungan untuk bisnis kecil dan informal.

Kondisi ini menjadi lebih buruk karena urbanisasi yang tidak diimbangi dengan industrialisasi yang merata, yang menghasilkan konsentrasi ekonomi di kota-kota besar sementara wilayah pedesaan semakin tertinggal secara ekonomi dan sosial. Meskipun seringkali membantu ekonomi selama krisis, sektor informal justru menyebabkan stagnasi struktural karena kurangnya perlindungan hukum dan akses ke pembiayaan. Di sisi lain, modernisasi yang terlalu berpusat pada sektor formal seringkali mengabaikan potensi dan kebutuhan sektor tradisional, yang menyebabkan ketimpangan dan memperlambat proses transformasi ekonomi yang berkeadilan. Evaluasi dampak dualisme ekonomi menunjukkan bahwa



ketidakseimbangan ini menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan menimbulkan perbedaan di antara wilayah dan kelompok masyarakat. Program seperti ekonomi hijau dan biru, yang berfokus pada pembangunan yang ramah lingkungan, masih terbatas dan belum mencapai pelaku sektor tradisional secara langsung. Oleh karena itu, strategi pembangunan inklusif diperlukan. Strategi ini dapat menjembatani sektor tradisional dan modern melalui pelatihan keterampilan, pendanaan komunitas, teknologi tepat guna, dan reformasi kebijakan yang terintegrasi. Indonesia akan mampu mengurangi ketimpangan dan mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan dalam jangka panjang dengan membangun sinergi antara sektor modern dan tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhikara, C., & Judijanto, L. (2024). *EKONOMI MODERN Dasar-Dasar dan Implikasinya*.
<https://www.researchgate.net/publication/389041221>
- Arfah, A., Subhandi Bakhtiar, H., & Winanti, A. (n.d.). Implementasi Kebijakan Ekonomi Hijau dalam Mendukung Pembangunan Nasional Berkelanjutan Secara Inklusif (Studi Perbandingan Indonesia dan Malaysia). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(4), 11–30.
<https://doi.org/10.59841/intellektika.v3i4.2818>
- Ayunda, S., Hasanah, T. U., Ariska, Y. A., & Fitriono, R. A. (2022). STRATEGI MENINGKATKAN PERKEMBANGAN EKONOMI DI ERA MODERN BERBASIS PANCASILA. In *Jurnal Gema Keadilan* (Vol. 9).
- Dualisme dalam Sektor Manufaktur Indonesia: Sebuah Uji Hipotesis dengan Analisis Input-Output*. (n.d.). http://www.petra.ac.id/~puslit/journals/dir.php?DepartmentID=MAN_DUALISME_TEKNOLOGI.
- Ekonomi Tradisional dan Perubahan Sosial*. (n.d.).
- Gultom, Y. M. L. (n.d.). Explaining the Informal Sector in Indonesia from the Transaction Costs Perspective *. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 16(1), 23–38.
<http://www.gamajib.mmuugm.ac.id/>
- Gunadi, F., Nazli, R. S. S., Putri, E. I. K., & Noorachmat, B. P. (2019). Analysis of Technological and Social Cultural Factors that Threaten the Sustainability of Food Self-sufficiency in West Java Province, Indonesia. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 9(3), 658–670.
<https://doi.org/10.29244/jpsl.9.3.658-670>
- Ilmu Manajemen, J., dan Ekonomi, B., Haggai Simanjuntak, S., Widodo, W., & Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra Pekanbaru, S. (n.d.). *Analisis Pengaruh Perubahan Struktural Ekonomi dalam Sistem Multiregional di Indonesia*. 3(1), 2025. <https://malaqbipublisher.com/index.php/JIMBE>
- Jamilatuzzahro, & Alaudin, F. G. (2024, 18 November). *Leveraging digital technology for greater inclusion in Indonesia*. EQUITAS FEB UGM. <https://equitas.feb.ugm.ac.id/2024/11/18/leveraging-digital-technology-for-greater-inclusion-in-indonesia/>
- Junaedi, M., S Daryanto, H. K., Sinaga, B. M., & Hartoyo, S. (n.d.). *EFISIENSI DAN KESENJANGAN TEKNOLOGI USAHATANI PADI SAWAH DI PULAU JAWA EFFICIENCY AND TECHNOLOGY GAP IN WETLAND RICE FARMING IN JAVA ISLAND*.
- Khoirun Rizky, Misagi Mukhti Ginting, Rahmat Ibrahim Dalimunthe, & Rizki Yawan Wijaya. (2025). Integrasi Green Economy dan Blue Economy untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 3(1), 280–289. <https://doi.org/10.61132/jepi.v3i1.1222>
- Marlioka, Y., Prima Cakra Randana, M., Sari Murni, N., Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang, S., Marlioka Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina, Y., Kesehatan, D., & Muskuloskeletal, G. (n.d.). *Lentera Perawat Analysis of Musculoskeletal Disorders (MSDS) Incidence in Employees at The Ogan Komering Ulu Timur District Health Office : A Cross-sectional Study Analisis Kejadian Musculoskeletal Disorders Pada Pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur : Studi Cross Sectional Kata Kunci*.
<https://jurnal.stikesalmaarif.ac.id/index.php/lenteraperawat/338>
- Mohammad Maulana Iqbal. (2023). Kemiskinan Struktural dan Mekanisme Survival Tukang Becak di Terminal Bratang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 12(2), 212–221.
<https://doi.org/10.23887/jish.v12i2.49795>
- piyoto. (n.d.).
- Prasetyanto, A., & Kustiwan, I. (2023). Pengaruh Pembangunan Ekonomi-Sosial dan Desentralisasi Fiskal

Terhadap Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia. *Bappenas Working Papers*, 6(3), 274–298.

<https://doi.org/10.47266/bwp.v6i3.222>

statistik-indonesia-1994. (n.d.).

Tahir, M., Darwis, M., Tinri, N., & Anas, F. (n.d.). *Ketimpangan Sosial dan Akses Terhadap Teknologi: Dampaknya Terhadap Mobilitas Sosial Masyarakat Di Kota Makassar.*

<https://jurnal.jomparnd.com/index.php/jp>

